

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam penulisan ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Awal berdirinya pemerintahan baru, situasi ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Tahun 1966 terjadi krisis multidimensi yang ditandai oleh kehancuran dasar-dasar pembangunan ekonomi dan budaya bangsa, Ancaman disintegrasi nasional, kemerosotan perekonomian, kelangkaan kebutuhan pokok, Tingkat inflasi yang tinggi, kemerosotan daya beli masyarakat terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok, dan meningkatnya penderitaan rakyat. Lahirnya Orde Baru di bawah pemerintahan Jenderal Soeharto merupakan harapan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Pada tahun 1966-1969 Orde Baru berupaya mengatasi kemerosotan perekonomian dengan cara menyelenggarakan pembangunan yang disebut dengan stabilisasi dan rehabilitasi titik Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi krisis yang terjadi negara Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari langkah tersebut maka Orde Baru mengadakan sidang yang menghasilkan TAP MPRS NO. XXXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan dan pembangunan dengan melaksanakan kebijakan program pembangunan jangka pendek diarahkan pada pengendalian inflasi, dengan mengadakan sistem debirokratisasi yang berarti perombakan cara pengawasan dan pengaturan dengan cara penghapusan lembaga yang dianggap tidak perlu serta pencabutan berbagai macam peraturan yang hanya menambah kesulitan Perekonomian Indonesia. Prioritas nasional pada tahun 1966-1968 adalah menanggulangi kemerosotan ekonomi

sekaligus berupaya memenuhi berbagai persyaratan yang memungkinkan pembangunan ekonomi supaya dapat berjalan dengan baik. Melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah berhasil menurunkan laju inflasi. Selain itu, negara Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1969 hingga 1998. Tahapan pembangunan yang dihimpun selama periode ini meletakkan landasan bagi proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia bermula dari peran para ekonom pada seminar dan simposium yang diadakan pada tahun 1966. Saat-saat kritis di tahun 1965/1966, Widjojo Nitisastro diminta untuk membantu Presidium Kabinet sebagai Ketua Tim Ahli Bidang Ekonomi Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet. Kepercayaan ini membuka cakrawala baru bagi penanganan masalah-masalah ekonomi. Kebijakan strategi yang mengoreksi tatanan kebijakan ekonomi Orde Lama dengan mengacu kepada UUD 1945 segera diluncurkan. Landasan dasar dan sistem manajemen ekonomi Orde Baru berhasil dirumuskan yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/1966 tentang "Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Melalui ketetapan MPRS ini disampaikan bahwa cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah kembalinya ke pelaksanaan undang-undang dasar secara murni dan menjunjung tinggi demokrasi ekonomi. Pada tahun 1967 Widjojo Nitisastro dipercaya untuk memimpin Bappenas. Dengan dukungan yang sangat kuat dari pimpinan Orde Baru Widjojo Nitisastro bersama dengan rekan-rekannya berhasil menyusun rencana pembangunan lima tahun pertama. Rencana pembangunan yang disusun oleh Bappenas ini ternyata dapat dilaksanakan dengan baik bahkan kemudian dapat dilanjutkan dengan Repelita-Repelita berikutnya sampai dengan Repelita VI. Menurut TAP XIII / MPRS / 1966 untuk

melaksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Ini termasuk pengendalian inflasi, pemulihan infrastruktur ekonomi dan peningkatan ekspor, yang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pada tahun 1966, pemerintah mengambil kebijakan dengan pendekatan luar negeri. Maksud dari kebijakan ini adalah mengadakan penjadwalan ulang hutang hutang luar negeri lama dan kedua mengusahakan utang baru dari luar negeri untuk menutupi defisit anggaran serta yang ketiga untuk mencari penanam modal asing ke Indonesia.

3. Dampak pemikiran Widjojo Nitisastro Dampak pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan keberhasilan yang mengagumkan. Hingga tahun 1996, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Orde Baru menunjukkan berbagai keberhasilan yang spektakuler. Namun demikian, keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi itu dibarengi dengan situasi politik yang tidak banyak memberi kebebasan bagi warga masyarakat luas. Ditambah lagi Pada pertengahan tahun 1997 hingga pertengahan tahun 1998 Indonesia terjerumus kedalam krisis ekonomi akut yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi social, ekonomi, dan politik. Sehingga Orde Baru sendiri mengalami keruntuhan. Perekonomian mengalami hiper inflasi, konstruksi dan pengangguran terbuka. Insiden kemiskinan meningkat tajam menjadi sekitar 18%. Krisis pangan demikian akut sehingga dkuatirkan menimbulkan sindroma kehilangan generasi di masa depan. Impor beras meningkat tajam hingga sekitar 6 juta ton yang berarti Indonesia kembali menjadi negara importir terbesar dunia.

5.2. Saran

Pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia telah membawa berbagai dampak bagi Indonesia hingga saat ini. Ada berbagai dampak yang dapat kita rasakan hingga

saat ini baik itu dampak positif maupun negatif. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini.

Pemikiran Widjojo Nitisastro memberikan titik terang terhadap keterpurukan ekonomi di awal berdirinya Orde Baru dan bahkan pemikirannya pun masih tetap relevan hingga saat ini. Namun disisi lain praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang berlangsung pada masa era Orde Baru berdampak terhadap penderitaan bangsa Indonesia hingga saat ini.

Keberadaan para pemikir ekonomi di masa lampau, semoga menjadikan motivasi terhadap generasi bangsa dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik kedepannya, dan perekonomian Orde Baru dapat menjadi koreksi agar tidak melakukan kesalahan ke depannya dan mengulangi kejaayan dimasa yang akan datang.

Dalam konteks penelitian. Penelitian ini masih sebatas gambaran umum tentang pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan secara lebih detail dan terperinci baagaimana pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia.